

KOORDINASI *STAKHOLDER* PADA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG

Yayat Sudrajat^{1*}, Indra Kristian²

¹Universitas Subang

²Universitas Jenderal Achmad Yani

* yayatunsub67@gmail.com

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 30-06-2024)

(Direvisi oleh Penulis : 15-07-2024)

(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 30-08-2024)

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya Sebesar Rp. 110.000,- melalui Mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di E-Warung /pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Himbara. Pelaksanaan program BPNT di tingkat Kabupaten / Daerah ada di bawah kendali Dinas Sosial Kabupaten Subang, yang tergabung dalam Tim Koordinasi Bansos Pangan serta di dukung oleh dinas dan instansi pemerintah yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran dan fungsi koordinasi *stakeholder* serta kendala-kendala atau hambatan koordinasi antar *stakeholder* terkait dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Subang. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, sedangkan informan pendukungnya adalah Kabid Pemberdayaan Sosial dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Tingkat Kab. Subang (Korteks). Hasil Penelitian ini memperlihatkan aspek hierarki manajerial telah dijalankan, aturan dan prosedur telah dilaksanakan dan penetapan rencana dan tujuan sudah disusun sejak mulai perencanaan kegiatan, akan tetapi hasilnya masih belum optimal. Oleh karena itu Sekretaris Tikor dalam hal ini Kepala Dinas Sosial Kab. Subang harus lebih memaksimalkan lagi upaya koordinasi dengan *stakeholder* lain dengan cara mengadakan rapat koordinasi yang terencana dan terarah sesuai dengan program prioritas Dinas Sosial.

Kata Kunci: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *Stakeholder*, Koordinasi

PENDAHULUAN

Pemerintah pada hakekatnya suatu organisasi yang sangat besar yang terdiri dari berbagai unsur aparatur pemerintah sebagai bagiannya yang harus bergerak sebagai kesatuan yang bulat berdasarkan pendekatan sistem. Sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai unsur, maka fungsi antar unsur agar mampu berjalan sesuai fungsi maka perlu adanya koordinasi antar unsur tersebut. Oleh sebab itu disamping peranannya dalam administrasi pada setiap unsur aparatur pemerintah, koordinasi juga mempunyai arti yang menentukan dalam administrasi sebagai satu keseluruhan aparatur pemerintah. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Subang sebesar 9,31 % atau sebanyak 148.538 Jiwa dari jumlah penduduk Subang sebanyak 1.595.464 Jiwa. Namun dalam pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) yang dilakukan oleh operator desa posisi oktober tahun 2020 tercatat data penduduk miskin dan rentan miskin di Kabupaten Subang berjumlah 648.211 atau sebanyak 41 % dari jumlah penduduk kabupaten Subang. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Berkaitan dengan sasaran penerima program BPNT, yaitu penduduk miskin yang harus masuk pada Data Basis Terpadu (BDT), walaupun pada kenyataan masih saja ada penduduk miskin di kabupaten subang yang tidak mendapatkan bantuan BPNT, dikarenakan salah satunya karena

penduduk tersebut tidak mempunyai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, sehingga tidak dapat di verifikasi dan validasi (Verval) melalui aplikasi SIK-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan – *Next Generation*).

Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan Tim Koordinasi yang dibentuk sebagai pelaksana program masih memiliki persepsi bahwa penanggulangan kemiskinan adalah bukan urusan utamanya karena tidak tercantum secara administrasi dalam tugas pokok dan fungsi maupun dalam dokumen pertanggung jawabannya, dan menganggap penanggulangan kemiskinan adalah tugas tambahan yang tidak bersifat wajib, namun demikian tidak berarti urusan penanggulangan kemiskinan ini terbengkalai.

KAJIAN PUSTAKA

Koordinasi adalah suatu proses mensinergikan dan menyeimbangkan segala aktivitas dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lain untuk mencapai tujuan tiap pihak sekaligus tujuan bersama. Atau lebih singkatnya, pengertian koordinasi adalah sebuah proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal.

Koordinasi menurut Mooney dan Reily dalam Handyaningrat (2002:88) menyatakan bahwa :“*Coordination as the achievement of ordely group effort, and unity of action in the pursuit of a common purpose.*”(Koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama).

Menurut E.F.L Breach dalam bukunya, *The Principle and Praticce of Management* yang dikutip Handyaningrat (2002:54) menyatakan:

“Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu

Yayat sudrajat, 2024. Koordinasi *Stakholder* Pada Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Dinas Sosial Kabupaten Subang dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri”.

Sedangkan menurut G.R Terry dalam bukunya, *Principle Of Management* yang dikutip Handyaningrat (2002:55), Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron/teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan”. Siagian(2001:05-22) menyatakan bahwa koordinasi merupakan kegiatan yang menyatukan berbagai kegiatan yang saling berbeda-beda akan tetapi mempunyai tujuan yang saling berhubungan. Sasaran utama koordinasi adalah untuk menciptakan “*unity action*” yang pada gilirannya akan menjamin keterpaduan pelaksanaan dan sekaligus meningkatkan efesiensi, efektivitas dan produktivitas kerjasama komponen yang terlibat.

Prinsip dalam koordinasi adalah berhubungan dengan tugas untuk mempersatukan usaha agar sasaran dan tujuan dapat dicapai dengan cara memperoleh keseimbangan dan keharmonisan kerja antara individu, kelompok kerja. Prinsip koordinasi harus dilakukan pada tahap awal proses manajerial. Koordinasi harus dimulai sejak proses perencanaan sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan implementasi yang baik. menurut Follet (1997:76) terdapat 4 prinsip, yaitu:

a. *Early Stage*, Berdasarkan prinsip tahap awal, proses koordinasi harus dilakukan pada tahap awal proses manajerial. Koordinasi harus dimulai sejak proses perencanaan sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan implementasi yang baik. Jika koordinasi selalu dilakukan di awal maka semua fungsi manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dengan proses koordinasi yang baik, tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih mudah dan cepat.

b. *Continuity*, Berdasarkan prinsip kesinambungan, koordinasi merupakan sebuah proses yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Proses koordinasi dimulai sejak membentuk organisasi sampai organisasi tersebut berjalan. Koordinasi selalu dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap proses *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

c. *Direct contact*, Berdasarkan prinsip kontak langsung, proses koordinasi dapat berjalan dengan baik karena adanya komunikasi langsung antara anggota organisasi. Seluruh manajer harus mampu berkomunikasi langsung dengan baik dengan bawahannya sehingga tercipta hubungan yang baik. Kontak langsung ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman, salah penafsiran, dan perselisihan antara manajer dan anggota organisasi lainnya. Dengan demikian manajer dapat mengkoordinasi berbagai aktivitas anggotanya secara efektif dan efisien.

d. *Reciprocal relation*, Prinsip timbal balik menyatakan bahwa semua faktor dalam organisasi saling bergantung dan berhubungan. Setiap keputusan dan tindakan seseorang di dalam organisasi akan mempengaruhi situasi keseluruhan organisasi. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan atau melakukan tindakan harus mempertimbangkan efek yang muncul pada orang lain atau departemen lain apabila keputusan atau tindakan tersebut diterapkan. Diterapkannya prinsip ini diharapkan manajer atau anggota lainnya mengambil keputusan atau tindakan sepihak, sehingga koordinasi dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Mekanisme koordinasi dibuat untuk dijadikan panduan dalam pelaksanaan koordinasi hal ini menjadi penting dalam

Yayat sudrajat, 2024. Koordinasi *Stakholder* Pada Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Dinas Sosial Kabupaten Subang pengembangan rencana dan tujuan yang ingin dicapai agar arah dan sasaran organisasi bisa dicapai dengan mudah. Menurut Handoko (2004:55) mekanisme dasar di dalam pencapaian koordinasi adalah komponen vital dari manajemen yakni :

- a. Hierarki Manajerial. Hierarki manajerial yaitu rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat memperlancar pelaksanaan dengan pengarahan yang tepat. Apabila mekanisme dasar yang diuraikan di atas tidak cukup efektif, sebaliknya dilakukan mekanisme tambahan.
- b. Rencana dan Penetapan Tujuan. Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian meliputi pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi
- c. Aturan dan Prosedur . Aturan-aturan dan prosedur-prosedur adalah merupakan keputusan-keputusan manajer yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi alat yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan. Aturan dan

prosedur digunakan sebagaipanduan bagi siapa saja yang terlibat dalam suatu penanganan permasalahan yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam sistem dan kehidupan kerja organisasi pemerintah. (Subagyo,A ;Kristian,I: 2023) Dalam hal penelitian ini penulis mengungkapkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan sebenarnya dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi yaitu Koordinasi *Stakholder* Pada Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Dinas Sosial Kabupaten Subang. Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena berbasis pada informasi/kenyataan yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah secara berkesinambungan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin baik berupa bantuan pangan atau uang. Pemerintah terus berupaya memperbaiki program bantuan yang diberikan agar dapat tepat sasaran, efektif dan mampu memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Beberapa program seperti bantuan pangan secara non tunai, diarahkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program agar mudah dalam mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpanan yang terjadi. Maka dari itu diperlukan koordinasi yang tepat antar stakeholder untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pejabat berwenang/berkompeten

Yayat sudrajat, 2024. Koordinasi *Stakholder* Pada Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Dinas Sosial Kabupaten Subang pada Organisasi Perangkat Daerah yang berkoordinasi pada pelaksanaan “ Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)” di Dinas Sosial Kabupaten Subang.

Didalam organisasi dibutuhkan koordinasi. Koordinasi sendiri di definisikan sebagai suatu usaha kerjasama antara unit atau satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja untuk mencapai tujuan bersama. tanpa adanya koordinasi maka setiap anggota dalam organisasi tidak memiliki pegangan mana yang harus diikiti, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri. Secara umum koordinasi adalah suatu proses atau kegiatan untuk mensinergikan dan menyeimbangkan segala aktivitas dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk meraih tujuan tiap-tiap pihak sekaligus tujuan bersama. Sebuah koordinasi sangat memerlukan komunikasi yang baik khususnya pada hal yang berkaitan dengan manajemen waktu. Hal ini dikarenakan supaya tidak menghambat kerja dan tanggung jawab masing-masing. Komunikasi harus terjalin saat melakukan koordinasi baik dalam satu ruang lingkup maupun ruang lingkup yang lebih luas. Komunikasi dalam koordinasi bertujuan untuk saling memberi informasi antar individu/departemen supaya tercipta sinergisitas dan tetap berpegang pada tujuan organisasi. Oleh karena itu organisasi harus memahami pengertian koordinasi dalam manajemen supaya lebih mudah dalam pencapaian tujuan.

Secara khusus koordinasi adalah keahlian untuk saling bekerjasama yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk meraih tujuan. Tujuan dari kerjasama dalam koordinasi juga memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk meraih keefektifitasan dalam keberjalanan manajemen organisasi secara optimal. Keefektifitasan optimal dalam koordinasi sebuah organisasi yaitu sebuah kesuksesan dalam pencapaian semua tujuan dengan tepat dan benar. Selain itu koordinasi bertujuan untuk mensinergikan pihak internal dan eksternal supaya berjalan selaras. Koordinasi merupakan kunci utama untuk meraih tujuan bersama dalam organisasi dengan menyeimbangkan

efisiensi dan efektifitas.

Dalam setiap organisasi, pasti memiliki sejumlah orang yang masing-masing mempunyai pendapat, pandangan, latar belakang, pengertian dan jenis pekerjaan sendiri yang berbeda dengan orang yang lainnya. Keberagaman ini perlu diselaraskan dan disinergikan agar dapat mencapai tujuan bersama yang diharapkan oleh organisasi. Penyelarasan ini biasanya disebut dengan koordinasi. Koordinasi dalam suatu organisasi memastikan kesatuan tindakan individu, kelompok kerja dan departemen dalam upaya membawa keserasian dan keharmonisan dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi.

a. Hierarki Manajerial

Hierarki manajerial yaitu rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat memperlancar pelaksanaan dengan pengarahan yang tepat. Apabila mekanisme dasar yang diuraikan di atas tidak cukup efektif, sebaliknya dilakukan mekanisme tambahan. Pelaksanaan koordinasi di dalam institusi pemerintahan menjadi suatu hal yang penting guna meningkatkan kinerja stakeholder dalam melaksanakan suatu tujuan. Agar koordinasi berjalan baik maka perlu didukung oleh syarat-syarat koordinasi dalam sebuah institusi pemerintahan. Adapun yang menjadi syarat-syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif diantaranya adanya hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif dan kepemimpinan dan supervisi yang efektif.

Berdasarkan penuturan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang selaku Sekretaris Tikor Bansos Pangan, dan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) sebagai anggota Tikor, juga sekaligus sebagai Supervisor pada program BPNT, dapat diketahui bahwa peran hierarki manajerial dinilai sangat penting sebab hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi stakeholder baik dalam melakukan

Yayat sudrajat, 2024. Koordinasi *Stakholder* Pada Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Dinas Sosial Kabupaten Subang

koordinasi maupun dalam penyaluran informasi yang harus ada dan berjalan serasi dan selaras disemua tingkatan, tetapi pada kenyataannya dapat dikatakan belum optimal.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terkait jawaban dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang selaku sekretaris Tikor Bansos Pangan dan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai anggota Tikor dan supervisor pada program BPNT, bahwa masih belum optimalnya koordinasi yang dilakukan stakeholder pada program BPNT ini, dikarenakan masih adanya anggapan bahwa program bantuan sosial pangan merupakan programnya Dinas Sosial semata, padahal di program BPNT ini banyak sekali OPD / Stakeholder yang terlibat di dalamnya seperti Sekretaris Daerah Kab. Subang, Kepala Dinas Sosial Kab. Subang, Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Subang, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Subang, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kab. Subang, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Subang, Kepala Dinas Ketahanan pangan Kab. Subang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Subang, Kepala kemeterian Agama Kab. Subang, Kepala Dinas Pertanian Kab. Subang, Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Subang, Kepala Bank Penyalur BPNT dan RASTRA Kab. subang, Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Kab. Subang, Kepala Bagian Hukum Sekda Kab. Subang, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Sekda Subang, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kab. Subang, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab. Subang, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial tingkat Kab. Subang (Korteks), dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial tingkat Kecamatan (TKSK) selaku pendamping program BPNT, sehingga diperlukan peran aktif semua OPD / Stakeholder dalam rangka mensukseskan program tersebut, hanya saja karena kurangnya koordinasi dan informasi inilah yang kemudian membuat tidak berjalannya Stakeholder yang ada dalam program BPNT.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Handoko (2003:195), koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan bahwa koordinasi yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya hanya sebatas dari tataran midle manajemen ke bawah belum melakukan koordinasi yang menyeluruh dari setiap tingkatannya. Baik koordinasi vertikal maupun horizontal belum bisa dikatakan optimal.

b. Aturan dan Prosedur

Aturan-aturan dan prosedur-prosedur adalah merupakan keputusan-keputusan manajer yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi alat yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan. Aturan dan prosedur digunakan sebagai panduan bagi siapa saja yang terlibat dalam suatu penanganan permasalahan yang terjadi. Berdasarkan hasil observasi penulis dapat diketahui bahwa aturan-aturan yang berlaku dalam program ini dimulai dari peraturan presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Peraturan Direktur Jenderal Nomor 06 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Pedoman Umum (Pedum) BPNT yang disusun oleh oleh Kementerian/Lembaga lintas Sektor terkait, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Staf Presiden, dan Sekretariat TNP2K, dan Keputusan Bupati Subang Nomor : 466/Kep.200-Dinsos/2018 tentang pembentukan Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan. Aturan-aturan diatas

Yayat sudrajat, 2024. Koordinasi *Stakholder* Pada Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Dinas Sosial Kabupaten Subang merupakan aturan-aturan pokok yang menjadi landasan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai, untuk aturan yang merupakan aturan yang bersifat lokal program ini baru diatur dalam bentuk Keputusan Bupati dengan kata lain tidak adanya aturan yang mengatur program ini dalam Peraturan Daerah. Sehingga ini yang menurut peneliti menjadi kelemahan, harusnya program ini diperkuat melalui peraturan daerah.

Pelaporan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari laporan para pendamping, baik itu pendamping PKH maupun TKSK. Adapun laporan yang disampaikan berisi lembar atau format monitoring padasaat penyaluran BPNT berlangsung yaitu setiap tanggal 25 setiap bulannya. Kemudian laporan tersebut disampaikan kepada Korteks dalam bentuk hard copy dan soft copy untuk direkap di tingkat Kabupaten, selanjutnya Korteks menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial selaku Supervisor BPNT, dan selanjutnya supervisor BPNT melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial selaku sekretaris Tikor. Setelah laporan dikaji dan dianalisa oleh sekretaris tikor selanjutnya laporan disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa – barat, kemudian provinsi melaporkan ke tingkat Pusat

c. Rencana dan Penetapan Tujuan

Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian meliputi pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi. Dalam rangka perencanaan dan penetapan tujuan merupakan program pemerintah pusat yang telah terstruktur dan sistematis yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dari pemerintah pusat hingga pemerintahan tingkat kabupaten. Yang dalam pelaksanaannya melibatkan organisasi perangkat daerah sebagai stakeholder. Dimana setiap stakeholder memiliki tugas

masing-masing dalam pelaksanaan program BPNT. Program BPNT yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia tentunya memiliki tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi yang baik antar stakeholder agar tujuan BPNT tersebut tercapai. Namun tentu dalam pencapaiannya ada kendala – kendala yang belum teratasi, seperti yang disampaikan oleh Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Tingkat Kabupaten (Korteks).

Penetapan tujuan mempengaruhi cara organisasi mengukur kinerjanya, dengan menggunakan konsep penetapan tujuan yaitu adanya kejelasan, tujuan yang menantang dan berkomitmen untuk mencapainya, Memberikan umpan balik pada kinerja, dan mempertimbangkan kompleksitas tugas. Penetapan tujuan memungkinkan manajemen untuk melakukan diagnosis kesiapan, mempersiapkan pegawai berkenaan dengan interaksi antara individu komunikasi, pelatihan dan perencanaan. Perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Dengan begitu maka dapat dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melalui koreksi terhadap penyimpangan sesegera mungkin, sehingga organisasi dapat dikendalikan dengan baik. Dengan adanya penetapan tujuan memberi kesempatan kepada pegawai untuk membuat hasil penilaian sendiri mengenai hasil-hasil pelaksanaan serta melakukan rapat koordinasi dan evaluasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan menerapkan syarat koordinasi diatas, maka alur koordinasi akan berjalan lancar. Koordinasi yang terjadi pada program BPNT tidak berjalan optimal dikarenakan komunikasi yang tidak berjalan dan tidak dilaksanakannya rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala. Pada rapat koordinasi, seluruh stakeholder dan unit-unit pelaksana hadir, dalam momentum inilah komunikasi dan peran supervisi ditentukan. Seberapa baik pelaksanaan program tersebut dan apa saja pencapaian pada program tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan evaluasi yang berkesinambungan. Salah satu maksud dibuat perencanaan adalah melihat

Yayat sudrajat, 2024. Koordinasi *Stakholder* Pada Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Dinas Sosial Kabupaten Subang

program-program yang dipergunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan diwaktu yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, perencanaan organisasi harus aktif, dinamis berkesinambungan dan kreatif.

Stakeholder dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan acuan yang telah direncanakan, dan inovasi yang mungkin harus ditingkatkan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai. Karena inovasi ini bisa dijadikan suatu proses penetapan tujuan yang baik, namun dalam program ini dalam hal inovasi belum maksimal. Dalam perencanaan program BPNT ini diperlukan anggaran dana untuk mendukung perencanaan yang sudah di tetapkan, sehingga diperlukan adanya dana pendampingan program BPNT dari Pemerintah Kabupaten Subang untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan perencanaan yang sudah di tetapkan. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa dalam rangka peningkatan program bansos panagan ini, Pemerintah Kabupaten Subang sudah mengalokasikan dana pendampingan untuk program BPNT melalui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial, walaupun alokasinya di rasakan masih sedikit, sehingga belum bisa mengakomodir semua pemangku kepentingan pada program BPNT ini, dan pelaksanaannya belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Kaitan dengan honor pendamping dalam melakukan pungsi pendampingan program baik dari unsur TKSK dan PKH sebesar Rp. 300.000,- / Bulan di rasa sangat kurang, jika dibandingkan dengan kinerja pendamping dalam melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan program, sehingga Pemerintah Kabupaten Subang, dalam hal ini bapak bupati subang harus dapat meningkatkan kesejahteraan para pendamping program.

Berkaitan dengan perencanaan penganggaran ini, diharapkan semua stakeholder dalam Tim Koordinasi Bansos Pangan dapat mengalokasikan dana pendampingan untuk program Bansos ini melalui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) pada masing masing OPD

terkait, sehingga timbul kesepahaman bersama, dan adanya sense of belonging atau timbulnya rasa memiliki terhadap program. Kaitan dengan aspek pengorganisasian, diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi, sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki. Tugas pengorganisasian adalah mengharmonisasikan kelompok orang yang berbeda, mempertemukan macam- macam kepentingan dan memanfaatkan seluruh kemampuan kesuatu arah tertentu. Dalam rangka mengoptimalkan dan memaksimalkan program BPNT ini maka dibentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan mulai dari Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten, sampai dengan Tingkat Kecamatan, dan dalam fungsi pengawasan dibentuk juga Satgas Pangan dari unsur Kepolisian. Di Kabupaten Subang sudah terbentuk Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan sesuai dengan Keputusan Bupati Subang Nomor : 466/Kep.200-Dinsos/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan Tingkat Kabupaten Subang, dimana Kepala Dinas Sosial sebagai pelaksana program BPNT sebagai Sekretaris Tikor Bansos Pangan.

Kaitan dengan aspek penggerakan bahwa Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pelaksanaan program BPNT ini.

Pada aspek penggerakan ini masing masing stakeholder belum melakukan tugas, fungsi dan peran sesuai dengan yang diharapkan sebagai anggota Tim Koordinasi Bansos Pangan, sehingga Kepala Dinas Sosial sebagai sekretaris Tikor harus kerja extra untuk memaksimalkan dan

Yayat sudrajat, 2024. Koordinasi *Stakholder* Pada Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Dinas Sosial Kabupaten Subang

mengoptimalkan pelaksanaan program BPNT ini. Kaitan dengan controlling yaitu proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana. Agar pelaksanaan program BPNT ini berjalan sesuai dengan tujuan maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk pengawasan, inspeksi hingga audit, sehingga diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengorganisasian, dapat mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan, dapat mengetahui adanya penyimpangan, dan dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan, Sehingga dapat segera dilakukan antisipasi.

Dalam hal melakukan controlling pada pelaksanaan program BPNT ini, maka Tikor Bansos pangan dalam hal ini Kepala Dinas Sosial sebagai Sekretaris Tikor, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial selaku Supervisor program BPNT, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Tingkat Kab. Subang (Korteks), dibantu oleh pendamping program BPNT tiap – tiap kecamatan baik dari unsur pendamping TKSK maupun unsur pendamping PKH, melakukan monitoring dan pengawasan pada setiap penyaluran program BPNT yaitu setiap tanggal 25 setiap bulannya, dimana pengawasan dan monitoring yang dilakukan yaitu memastikan prinsip 6 T (tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tepat kualitas, tepat kuantitas, dan tertib administrasi), sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program BPNT.

Dari ke empat aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa pada aspek perencanaan dan aspek penggerakan kurang optimal dilakukan, tetapi pada aspek pengorganisasian dan aspek controlling sudah cukup maksimal dilakukan, hal ini menandakan bahwa pada setiap perencanaan program belum didukung dengan action yang jelas.

Berdasarkan uraian diatas mengenai rencana dan penetapan tujuan, penulis dapat menyimpulkan bahwa program BPNT dapat berjalan dengan lancar dan optimal jika koordinasi yang secara berjenjang mampu dilaksanakan dengan

baik dengan pemangku kepentingan yang terlibat, kemudian untuk memperoleh hasil program yang maksimal maka pemangku kepentingan dalam hal ini Kepala Dinas Sosial harus mampu menguasai seluruh fungsi manajemen, baik itu Fungsi Perencanaan, Fungsi pengorganisasian, Fungsi Penggerakan, dan Fungsi Pengendalian atau Pengawasan. Terkait rencana dan penetapan tujuan yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan secara vertikal dan horizotal, mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan pada program BPNT. Dengan koordinasi yang tepat dan efektif, dan semua stakeholder berperan pada tugasnya masing-masing maka tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Dilihat dari hierarki manajerial, bahwa dalam koordinasi yang dilakukan secara berjenjang dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan evaluasi yang melibatkan seluruh stakeholder. Seluruh pemangku kepentingan melakukan koordinasi antar tim koordinasi dalam pelaksanaan program BPNT. Hierarki manajerial dalam hal ini yakni rantai perintah, aliran informasi, yang ada di dalam Tim Koordinasi yang melibatkan banyak stakeholder baik secara vertikal dan horizontal belum terlaksana dengan baik dengan indikasi jarang nya rapat koordinasi dan evaluasi yang dilaksanakan selama program BPNT berlangsung, sehingga ada mata rantai perintah dan aliran informasi yang terputus di dalam Tim Koordinasi, hal inilah yang menyebabkan peran dan fungsi dari masing masing anggota Tim Koordinasi bansos pangan tidak berjalan dengan optimal. Selama ini koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial hanya pada tataran midle ke bawah, yaitu melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Desa sampai ke tingkat pendamping, padahal peran OPD/ stakeholder terkait, sesuai Surat Keputusan Bupati Subang Nomor: 466/Kep.200- Dinsos/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Subang juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk mensukseskan program BPNT ini, inilah yang belum optimal dilaksanakan oleh Dinas

Yayat sudrajat, 2024. Koordinasi *Stakholder* Pada Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Dinas Sosial Kabupaten Subang
Sosial selaku Sekretaris Tikor Bansos Pangan, untuk dapat menimbulkan sense of belonging atau rasa memiliki dari Tim Koordinasi terhadap program BPNT.

b. Adapun mengenai aturan dan prosedur, bahwa semua aturan dan prosedur yang disusun dalam rangka mensukseskan program BPNT di Dinas Sosial Kabu. Subang dimulai dengan adanya Peraturan Presiden RI, Peraturan Menteri Sosial, Peraturan Direktur Jenderal, Pedoman Umum (Pedum) BPNT, dan SK pembentukan Tim Koordinasi dari Bupati Subang. Aturan dan prosedur dirancang sedemikian rupa agar pelaksanaan program BPNT di Dinas Sosial Kabupaten Subang dapat berjalan optimal dan sistematis sesuai dengan tujuan program BPNT. Aturan dan Prosedur dalam pelaksanaan program ini belum maksimal di lakukan, salah satunya karena kurangnya sosialisasi pedoman umum (Pedum) BPNT kepada seluruh anggota Tim Koordinasi, karena kesempatan untuk menyampaikan pedum juga informasi – informasi lainnya terkait pelaksanaan program BPNT ini sangat terbatas, hanya pada rapat koordinasi, sedangkan pelaksanaan rapat koordinasi pun jarang dilakukan, hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman bersama dari Tim Koordinasi pada pelaksanaan program tersebut, dan juga yang belum adanya sense of belonging atau rasa memiliki pada program bansos BPNT ini.

c. Rencana dan penetapan tujuan program BPNT sudah ditetapkan sejak awal, mulai dari penerima sasaran program, cara mensosialisasikan kepada masyarakat dan cara pelaporan yang berjenjang dari mulai pelaksana di tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat Pusat. Namun semua hal tersebut masih dilakukan secara konvensional. Berkaitan dengan rencana penganggaran diperlukan anggaran dana untuk mendukung perencanaan yang sudah di tetapkan, sehingga diperlukan adanya dana pendampingan program BPNT dari Pemerintah Kabupaten Subang untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan perencanaan yang sudah di tetapkan. Dalam rangka mengoptimalkan program bansos pangan ini, Pemerintah Kabupaten Subang sudah mengalokasikan dana pendampingan

untuk program BPNT melalui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial, walaupun alokasinya di rasakan masih sedikit, sehingga pelaksanaannya belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan perencanaan penganggaran ini, diharapkan semua stakeholder dalam Tim Koordinasi Bansos Pangan dapat mengalokasikan dana pendampingan untuk program Bansos ini melalui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) pada masing masing OPD terkait, sehingga timbul kesepahaman bersama, dan adanya sense of belonging atau timbulnya rasa memiliki terhadap program. Kaitan dengan honor pendamping dalam melakukan fungsi pendampingan program baik dari unsur TSKS dan PKH sebesar Rp. 300.000,- / Bulan di rasa sangat kurang, jika dibandingkan dengan kinerja pendamping dalam melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan program

d. Rencana dan penetapan tujuan dapat tercapai dengan maksimal, maka pemangku kepentingan dalam hal ini Kepala Dinas Sosial harus mampu menguasai seluruh fungsi manajemen, baik itu Fungsi Perencanaan, Fungsi pengorganisasian, Fungsi Penggerakan, dan Fungsi Pengendalian atau Pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu.2016. Manajemen: dasar, pengertian dan masalah. Jakarta: Bumi Aksara
- Liliweri, Alo. 2014. Sosiologi & Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara
- Moekijat. 1994.
- Koordinasi (suatu tinjauan teoritis). Bandung:Mandar maju.
- Hasibuan, S.P.Malayu, 2009 Manajemen: Dasar-dasar, Pengertian, dan Masalah, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kristian, I; Pancasila dan Kewarganegaraan Alfabeta 2019
- Kristian I, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. Jurnal Dinamika Vol 9, No 1 (2022) 23-37

- Pasalong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Negara. Bandung: Alfabeta
- Salusu, J. 1996. Pengambilan keputusan strategik. Jakarta: Grasindo.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei.. Jakarta : LP3ES Siagian
- S.P. 1997. Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi, Jakarta. PT.Gunung Agung.
- Silalahi, Ulbert, 2005. Studi Tentang Ilmu Administrasi, Bandung : Algensindo.
- Siagian, Sondang P. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. 2011. Asas-Asas Manajemen. Bandung: Refika Aditama
- Siswanto. 2010. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara
- Singarimbun, Efendi. 1995. Metode Penelitian Bidang Administrasi, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sofyandi, Herman dan Iwa Garniwa. 2007. Perilaku Organisasional. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sopiah. 2008. Perilaku organsasional. Yogyakarta: Andi.
- Subagyo, A., Ip, S., Kristian, I., Ip, S., & Kom, S. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. *CV. Aksara Global Akademia*.
- Sudrajat, Y., & Kristian, I. (2022). Implementasi Aplikasi E-Retribusi di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(2), 116-127.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif dan Pendekatan. Jakarta: Kencana.
- Umam, Khaerul. 2010. Perilaku Organisasi. Bandung: Pustaka setia.
- Usman, Husaini. 2011 manajemen teori, praktek dan riset pendidikan jilid 3. Jakarta: Bumi aksara.
- Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
- Peraturan Direktur Jenderal Nomor 06 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis

Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
Keputusan Bupati Subang Nomor : 466/ Kep.200 – Dinsos / 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Subang tahun 2018